

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjarangan

Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan

Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice
Program Director-Oxfam in Indonesia)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / *Articles*

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance*..... 311-321
Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines*..... 323-331
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan*..... 333-344
Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta*..... 345-357
Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung*..... 359-368
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / *Interview*

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy*..... 369-374
Abby Gina

Kata Makna / *Words and Meaning*

Nur Iman Subono 375-376

Profil / *Profile*

Masnua, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnua, Fisherwomen Rights Defender*..... 377-383
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / *Book Review*

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights*..... 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan

Fisherwomen

“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis,

tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk “*champions*” (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia. (Anita Dhewy)

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: existence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Indonesia)

**Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi
Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium
dan Kamal Muara, Penjaringan**

***Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and
Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium
and Kamal Muara Village, Penjaringan***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar
pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggeser para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah

tangga nelayan akan tergusur dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah terjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian
Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

**Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan
Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke,
Jakarta Utara**

***Productive, Reproductive and Community Roles of Women
Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2
gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolaan. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability

categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

College of Social Work and Community Development
University of the Philippines – Diliman
Magsaysay Ave, Diliman, Quezon City, 1101 Metro Manila, Filipina

seafishj@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 25 September 2017, direvisi 3 Oktober 2017, diputuskan diterima 15 Oktober 2017

Abstract

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Abstrak

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

Pendahuluan

Salah satu prinsip utama SEAFish adalah menyadari bahwa salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan dalam perikanan adalah adanya aktualisasi kesetaraan gender dalam perikanan skala kecil dan akuakultur. Dengan mengadopsi kerangka kerja yang responsif gender dalam pengembangan perikanan berkelanjutan serta merta dapat mengadvokasi hak perempuan di sektor perikanan.

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan Analisis Gender dan Feminis sebagai kerangka untuk menganalisis data. Pengumpulan dan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan kombinasi

beberapa kerangka kerja dan metode seperti Kerangka Peran Gender (Peran Reproduksi, Produktif dan Peran Masyarakat)¹; Kerangka Relasi Sosial²; Kebutuhan Gender Praktis dan Kepentingan Gender Strategis³ dan Analisis Kebijakan Gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif seperti pemetaan, diskusi kelompok, rangking, kalender harian, dan narasi naratif. PROCESS-Bohol menggunakan metode survei mini karena penelitian ini melibatkan beberapa desa. Semua peneliti studi kasus menggunakan wawancara informan untuk mendapatkan data rinci dari responden tertentu. Perempuan dan laki-laki dewasa, dan dalam beberapa kasus, anak perempuan dan anak laki-laki, adalah partisipan utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan isu dan masalah yang dikaji dalam studi kasus, artikel ini mencoba untuk mengkaji tantangan umum yang dihadapi perempuan dalam perikanan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti ruang-ruang yang muncul untuk menegosiasikan, menciptakan, memfasilitasi dan mempromosikan pemberdayaan perempuan, keadilan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat nelayan.

Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Perikanan Tangkap, Akuakultur dan Aktivitas Nonperikanan

Dalam komunitas nelayan perikanan tangkap dan akuakultur, perempuan dan laki-laki melakukan berbagai pekerjaan sebagai rumah tangga nelayan. Tugas ini sering tumpang tindih, dinamis dan multidimensi. Hampir selalu, perempuan miskin menjalankan peran mereka dalam perikanan di samping peran tradisional mereka dalam memelihara rumah tangga dan mempertahankan ekonomi perawatan. Ekonomi perawatan adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan di lingkup domestik, dengan menjaga agar angkatan kerja tercukupi pangan dan sandangnya, dan merawat angkatan kerja masa depan, sehingga masyarakat dapat berjalan secara efektif (Elson 1999).

a. Perikanan Tangkap Skala Kecil

Di sebagian besar lokasi penelitian, laki-laki mendominasi kegiatan penangkapan ikan di laut dan darat, dan perempuan biasanya membantu kegiatan pra dan pascapanen seperti persiapan makanan, memperbaiki jaring, menyiapkan umpan, pengolahan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Di banyak wilayah pesisir, partisipasi perempuan dalam industri perikanan merupakan bagian dari masyarakat nelayan di pesisir dimana mereka menggunakan tepi laut/pantai, atau sebagai bagian dari pekerjaan keluarga bersama laki-laki. Gambaran ini sering dijumpai di daerah muara dangkal, hutan bakau dan daerah dekat pantai dimana perempuan mengumpulkan kepiting kecil, udang dan kerang untuk dijual atau untuk konsumsi pribadi. Perempuan dalam rumah tangga nelayan turut membantu memperbaiki jaring dan menyiapkan umpan. Perempuan nelayan kebanyakan bertanggung jawab memasarkan hasil tangkapan ikan, baik menjualnya secara massal ke pedagang grosir atau menjualnya di kios pasar atau dengan berjalan kaki di desa-desa terdekat.

Persaingan yang meningkat di kalangan nelayan skala kecil dan besar serta degradasi sumber daya perikanan yang tidak terkendali mendorong perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan penangkapan ikan. Terbatasnya partisipasi perempuan dalam perikanan

tangkap di area studi kasus dipengaruhi oleh (i) kepercayaan budaya tertentu dan sistem konstruksi sosial yang membuat perempuan tersingkir dari pekerjaan utama dalam penangkapan ikan, sehingga menegasikan mereka dari pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi penangkapan ikan; (ii) laut sebagai lingkungan fisik (pada waktu-waktu tertentu dalam kurun satu tahun, laut dalam kondisi cuaca buruk membuat ikan sulit melewati perairan pesisir); dan, (iii) metode ekstraksi dan tingkat teknologi yang digunakan (beberapa metode penangkapan ikan menuntut adanya kinerja fisik).

Di Danau Tonle Sap, misalnya, istri dan anak perempuan semakin terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan terutama pada musim puncak penangkapan ikan. Mereka membantu suami atau ayah mereka dengan menebarkan jaring dan jebakan untuk meningkatkan tangkapan dan mempersingkat perjalanan menangkap ikan. Janda atau perempuan dari rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, yang juga termasuk komunitas paling miskin di desa, juga melakukan kegiatan penangkapan ikan. Namun, karena kurangnya peralatan, aktivitas penangkapan ikan mereka terbatas pada perairan dangkal dimana mereka hanya menangkap ikan dengan nilai rendah yang disebut *trey nu* yang terutama digunakan untuk pakan ikan. Partisipasi terbatas pada perempuan dalam perikanan skala kecil dipengaruhi oleh kepercayaan budaya dan lingkungan fisik tempat penangkapan ikan.

b. Akuakultur

Berbagai jenis akuakultur memiliki potensi yang berbeda bagi partisipasi laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan perikanan tangkap. Ketika laki-laki dan perempuan berbagi tanggung jawab dalam memberi makan ikan/udang, mengontrak pemanen, memasarkan dan melakukan pencatatan, perempuan menganggap adanya peran penting hubungan produksi di hulu (input dan layanan untuk akuakultur) dengan hilir (pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan produk). Perempuan sangat mampu melakukan metode budidaya ikan yang sederhana. Karena perempuan secara tradisional mampu merawat ternak, sehingga perluasan tanggung jawab mereka ke akuakultur lebih mudah karena mereka sudah dapat mengakses input yang diperlukan dan terbiasa dengan produksi hewan.

Di Filipina, sebagian besar tambak payau di negara ini; (i) dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tambak namun hanya separuh yang mengelola sendiri tambak mereka dan separuh lainnya mempekerjakan para pengurus tambak; (ii) mereka yang terlibat langsung dalam

operasi tambak berasal dari rumah tangga miskin; dan, (iii) sebagian besar usaha budi daya akuakultur secara ekstensif menggunakan tenaga kerja keluarga atau rumah tangga. Sebagian besar pekerjaan (80%) terutama yang terkait dengan persiapan tambak, pengadaan input (bibit, pupuk dan pakan), penerapan pupuk dasar, dan pemanenan dilakukan oleh laki-laki. Namun, laki-laki dan perempuan (biasanya istri pemilik tambak ikan) berbagi tanggung jawab dalam memberi makan ikan, mengontrak pemanen, pemasaran dan pencatatan. Perempuan dari rumah tangga nonpemilik tambak atau nonperawatan bekerja di tambak ikan dan perusahaan pemilik tambak sebagai teknisi laboratorium dan manajer, posisi yang dibayar tinggi dan diperlakukan dengan baik oleh pekerja laki-laki.

Selain peran penting dalam hubungan produksi di hulu (input dan layanan untuk akuakultur), keterlibatan perempuan dalam hubungan hilir (pemrosesan, penyimpanan, dan pengangkutan produk) juga signifikan. Perempuan memainkan peran penting dalam pengumpulan kerang dan moluska yang digunakan sebagai pakan alami di kolam ikan air payau. Pekerjaan ini penting dalam polikultur dan sistem produksi yang luas yang dianggap tidak ekonomis untuk menggunakan umpan bernilai tinggi. Perempuan juga melakukan tugas seperti menyortir ikan dan moluska setelah masing-masing panen. Meskipun musiman, pendapatan mereka cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap total pendapatan rumah tangga.

Laki-laki (kebanyakan) adalah pemilik dan pengurus tambak ikan dan kegiatan akuakultur, namun ada kecenderungan yang muncul, yakni lebih banyak perempuan yang mengambil lebih banyak pekerjaan yang secara tradisional merupakan domain laki-laki (misalnya persiapan kolam ikan) karena kurangnya tenaga kerja laki-laki sebagai dampak dari migrasi dan kesempatan kerja yang terbatas bagi perempuan. Peran perempuan dalam mengelola anggaran rumah tangga dan finansial meluas hingga ke produksi akuakultur. Karena sebagian besar kinerja berbasis rumah tangga, perempuan bertanggung jawab untuk mengurus keuangan, namun mereka tidak dapat membuat keputusan terkait bagaimana anggaran akan dialokasikan. Keputusan utama dalam kegiatan akuakultur biasanya berada pada kepala rumah tangga laki-laki.

c. Kegiatan Pemungutan dan Pengumpulan

Kegiatan pemungutan dan pengumpulan yang dilakukan oleh perempuan berkontribusi untuk memastikan ketersediaan pangan bagi rumah tangga

nelayan namun degradasi sumber daya perikanan, polusi dan pembangunan mega infrastruktur sangat memengaruhi fungsi ini. Dibanding laki-laki, perempuan lebih aktif dalam kegiatan pemungutan dan pengumpulan terutama di daerah pedalaman dan zona intertidal. Perempuan mengumpulkan kepiting, kerang, rumput laut dan udang kecil pada dasarnya untuk konsumsi rumah tangga dan untuk dijual. Kegiatan ini membantu dalam menyediakan makanan untuk keluarga dan menghasilkan sedikit uang. Namun, penelitian menunjukkan bahwa karena penghancuran kawasan bakau akibat pembangunan tambak ikan/udang, pembangunan mega infrastruktur dan meningkatnya tingkat pencemaran, pendapatan perempuan dari kegiatan pengumpulan dan pemungutan dirasa mulai terancam.

d. Kegiatan Pemasaran dan Pemrosesan Ikan

Perempuan biasanya terkonsentrasi pada perdagangan ikan eceran domestik skala kecil namun memiliki akses terbatas terhadap fasilitas permodalan, transportasi dan penanganan fasilitas; oleh karena itu mereka ditempatkan untuk menangani ikan dengan nilai rendah, sementara laki-laki mendominasi keseluruhan penjualan dan ekspor. Para aktor dengan modal yang lebih besar memasuki sektor ini sebagai pemodal, agen ekspor dan perantara yang mengendalikan perdagangan ikan dan distribusi, terutama ikan dengan nilai lebih tinggi. Pedagang ikan perempuan selalu dalam perjuangan terus-menerus melawan pedagang grosir besar yang bisa membeli ikan bernilai tinggi dalam volume lebih besar dan yang bisa menurunkan harganya dan tetap bisa menikmati keuntungan lebih besar. Dengan demikian, perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah, modal minim dan akses terbatas pada fasilitas transportasi dan penanganan diposisikan untuk menangani ikan dengan nilai rendah.

Di Danau Tonle Sap, sejak dahulu, perdagangan ikan di desa telah didominasi oleh perempuan, namun peran penting ini perlahan berkurang karena sistem "barter ikan-padi" dengan desa tetangga penghasil beras diganti oleh sistem ekonomi tunai. Pedagang ikan (kalangan menengah) atau agen-agen mereka, telah menembus desa nelayan dan membeli ikan secara massal. Banyak juga yang melakukan perjanjian dengan nelayan dimana mereka memberikan pinjaman dengan imbalan hak untuk membeli tangkapan nelayan, yang dalam kebanyakan kasus, dihargai lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Meskipun demikian, banyak nelayan dan perempuan lebih suka menjual ikan ke orang-orang

menengah atau *moi* karena beberapa alasan: (i) karena jumlah ikan yang dijual sedikit, mereka menghemat biaya transportasi, tenaga kerja dan biaya transaksi lainnya; (ii) mereka dapat segera mendapatkan uang tunai untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga lainnya dan membayar utang; dan, (iii) mereka tidak perlu khawatir akan pembusukan ikan karena mereka tidak memiliki akses untuk fasilitas penyimpanan es.

Perempuan di komunitas nelayan turut berperan penting dalam pengolahan ikan, yang biasanya merupakan usaha kecil berbasis rumah.

Di waktu luangnya, ia dan putrinya mengolah ikan yang tidak dijual seperti beseng dan teri. Namun dalam jumlah yang sedikit. Ikannya dikeringkan di bawah terik matahari. Setelah pengeringan, ikan digiling dengan menggunakan alat tradisional, lumpang dan alu, sampai lembut. Dengan menambahkan garam, olahan ikan ini dijadikan terasi. Terasi biasanya ditambahkan ke sambal (bumbu cabai dan bawang merah). Jika dia menghasilkan lebih dari cukup untuk penggunaan keluarga, sisanya dijual di pasar tradisional. (Cerita Mm Habibah dikutip dalam Saragih & Ramanta 2008)

e. Kegiatan Ekonomi Lainnya

Pekerjaan perempuan dalam sektor ekonomi informal meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan rumah tangga nelayan; selama bulan paceklik dalam perikanan/akuakultur, pendapatan perempuan bukan saja merupakan kebutuhan bagi keluarga, namun juga bagi perikanan. Perempuan dalam masyarakat nelayan pesisir melakukan kegiatan di luar perikanan, yang memberi mereka beberapa bentuk pendapatan finansial yang stabil karena pendapatan dari perikanan pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Selain pengolahan ikan, mereka terlibat dalam usaha kecil, berbasis rumah tangga, beberapa usaha (misalnya menjual makanan/camilan, kerajinan tangan, menenun dan memelihara hewan di halaman belakang) atau pekerjaan musiman sementara (misalnya mencuci pakaian untuk tetangga yang baik, bekerja di peternakan). Pendapatan dari kegiatan ini sangat penting bagi rumah tangga karena sangat dibutuhkan untuk membeli makanan dan membayar utang. Pada saat krisis, kegiatan ekonomi perempuan menjadi semakin kritis dan meluas terutama di masyarakat yang bergantung pada perikanan.

Mata pencaharian perempuan di Marunda bervariasi - mengupas kulit kerang hijau, mencari cilong, mencuci pakaian tetangga, menjual ikan segar dan udang, serta membuat dan menjual terasi. Dalam kegiatan ekonomi ini, mereka berpenghasilan rata-rata dari

Rp10.000,00 hingga Rp15.000,00 per hari. Dengan pendapatan rata-rata keluarga di desa (Rp10.000,00 - Rp20.000,00), dapat diperkirakan bahwa kontribusi perempuan merupakan bagian yang besar bagi total pendapatan rumah tangga. (Saragih & Ramanta 2008)

f. Kegiatan Masyarakat dan Struktur Pengambilan Keputusan

Kegiatan masyarakat dalam produksi ekonomi, peningkatan produktivitas dan politik cenderung melibatkan lebih banyak laki-laki, sementara perempuan mendominasi kegiatan sosial dan mempromosikan kesejahteraan keluarga dan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan perawatan anak, sanitasi, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan masyarakat sangat ditentukan oleh peran mereka dalam produksi dan reproduksi sosial. Vietnam mungkin berbeda dengan beberapa negara dalam hal partisipasi gender dalam kegiatan masyarakat. Di kampung-kampung pedesaan Vietnam, kemungkinan perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat terutama mengenai pertanian tetapi perempuan terutama terlibat dalam kegiatan diseminasi informasi mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam berbagai diskusi, peserta laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa perempuan kebanyakan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan atau penyebaran informasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sementara laki-laki sama sekali tidak hadir. Seperti yang diingat oleh seorang perempuan, "Saya ingat sebuah pertemuan tentang keluarga berencana. Ada sekitar 400 perempuan yang hadir dan mendiskusikan banyak hal, namun, hanya ada satu orang laki-laki - dia adalah dokter yang bertanggung jawab untuk menjelaskan topik tersebut." Alasan terbatasnya laki-laki atau kurangnya partisipasi laki-laki dapat ditelusuri melalui konsepsi umum bahwa perempuan bertanggung jawab atas keluarga berencana sebagai bagian dari kewajiban mereka kepada keluarga. Beberapa laki-laki melaporkan bahwa mereka tidak diundang atau diberi penyuluhan tentang populasi, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (MCD 2008a).

Laki-laki mengambil posisi yang lebih dominan dalam acara komunitas seperti pertemuan, lokakarya, dan kegiatan sosial. Mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan di masyarakat sementara para perempuan memiliki lebih sedikit kekuatan dalam mengambil

keputusan. Ketika ditanya “Jika ada kesempatan bagi suami dan istri untuk menghadiri pertemuan desa, siapa yang akan pergi?” Seringkali dijawab dengan, “laki-laki akan pergi”. Frekuensi partisipasi laki-laki dalam kegiatan masyarakat lebih tinggi daripada perempuan—laki-laki biasanya menghadiri pertemuan minimal 3 kali per bulan sementara perempuan hanya hadir sebulan sekali. Meskipun beberapa perempuan berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi masyarakat, ini tidak mewakili seluruh masyarakat (MCD 2008b).

Penyebaran informasi tentang keluarga berencana dilakukan oleh para pekerja dari keluarga berencana dan Serikat Perempuan yang sebagian besar adalah perempuan. Hal ini dikritik karena dianggap tidak sensitif terhadap gender; penyebaran informasi dan target pelatihan sebagian besar adalah anggota perempuan dari masyarakat dan Serikat Perempuan itu sendiri, dengan asumsi bahwa dengan menjadi organisasi massa yang terdiri dari perempuan, sudah pasti mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut di setiap tingkat. Situasi yang sama terjadi dalam kegiatan mempromosikan perawatan kesehatan keluarga dan kesejahteraan. Tanpa disadari, dengan menargetkan laki-laki dalam kegiatan ini, peran dan tanggung jawab laki-laki dalam mempromosikan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kesejahteraan justru tidak ditekankan.

Di sisi lain, pelatihan dan penyuluhan pada pertanian, perikanan dan akuakultur seringkali menargetkan keuntungan bagi laki-laki karena paradigma para penyuluh, LSM dan pengelola masyarakat masih terstruktur dalam konstruksi dimana petani, nelayan dan operator kolam/kandang/kurungan sebagai domain laki-laki. Ketika perempuan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, mereka datang sebagai wali/perwakilan dari suami mereka yang bekerja di tempat lain, mereka memiliki “hak suara” dalam diskusi, dan komentar serta saran dari mereka sering kali dinegasikan.

Kepemimpinan dalam masyarakat nelayan masih didominasi oleh laki-laki; ketika perempuan menempati posisi terpilih, mereka diberi tugas yang bersifat domestik (*housekeeping*) seperti sekretaris dan bendahara. Penelitian yang dilakukan oleh ELAC di beberapa desa nelayan di Filipina menunjukkan bahwa ketika jumlah perempuan yang terpilih menduduki jabatan di desa (Barangay) meningkat, mereka tetap merupakan minoritas. Demikian juga, mereka lebih cenderung berperan sebagai sekretaris atau bendahara di dewan Barangay.

g. Organisasi Warga/Masyarakat

Perempuan tidak banyak memiliki kesempatan untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi. Ketika perempuan diberi ruang di dalam organisasi nelayan, seringkali minat dan kebutuhan mereka bukan bagian dari agenda organisasi. Bila nelayan telah mengatur, perempuan cukup jarang menjadi bagian dari organisasinya. Di banyak lokasi penelitian, dorongan untuk membentuk organisasi adalah hasil proyek dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga akademis, LSM dan dalam beberapa kasus, adalah sektor swasta. Pembentukan organisasi biasanya berpusat pada isu-isu mengenai peningkatan produktivitas, akses kredit, dan pengelolaan sumber daya perikanan. Target peserta/penerima manfaat dari proyek biasanya adalah laki-laki karena anggapan bahwa laki-laki adalah produsen ekonomi (nelayan) dan kepala rumah tangga.

Dengan hadirnya organisasi massa di tingkat masyarakat di Vietnam seperti Serikat Petani dan Serikat Perempuan, baik perempuan maupun laki-laki didorong untuk bergabung dengan organisasi. Namun, dalam beberapa wawancara mengungkapkan bahwa ada beberapa perempuan yang tidak berpartisipasi dalam organisasi apapun karena kekurangan waktu, atau karena sibuk mencari nafkah. Mereka berpendapat bahwa kegiatan organisasi tidak membahas masalah mereka mengenai pengembangan mata pencaharian.

h. Stratifikasi Gender dan Budaya pada Tenaga Kerja Nelayan

Sosialisasi dan pembagian kerja di dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh nilai dan praktik budaya. Meskipun ada perbaikan signifikan dalam status perempuan di lokasi penelitian, ekspektasi dan persepsi yang ada mengenai peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat masih dibentuk oleh budaya tradisional. Perspektif teoretis yang digunakan untuk menjelaskan pembagian kerja rumah tangga meliputi (i) ketersediaan waktu setiap pasangan - pembagian kerja rumah tangga ditentukan pada saat setiap pasangan berada di rumah, pasangan yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah lebih banyak; (ii) pertukaran sumber daya antara suami dan istri - pasangan dengan penghasilan rendah lebih banyak bekerja; (iii) ideologi - pembagian kerja terkait dengan peran gender di mana perempuan dan laki-laki yang memiliki sikap egaliter akan memiliki pembagian kerja yang lebih setara; dan, (iv) stratifikasi gender - pembagian kerja yang tidak setara adalah bagian dari sistem berlapis

gender yang lebih luas yang menyerap semua tingkat masyarakat dan merupakan refleksi dari sejarah panjang pengendalian laki-laki atas sumber daya (Shelton & John 1996).

Pada umumnya, perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga penghasil rumput laut bisa memulai aktivitas sehari-hari di waktu yang bersamaan, namun

perempuan sering bekerja hingga larut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya atau melakukan aktivitas mata pencaharian tambahan. Sebelum laki-laki melakukan budidaya rumput laut, mereka akan kembali ke pantai pada jam 2 siang (dari menangkap ikan), mandi dan kemudian pergi keluar untuk bersosialisasi dengan tetangga.

Tabel 1. Beban Kerja Harian Perempuan dan Laki-laki

Istri	Suami
5 pagi - bangun dan menyiapkan sarapan pagi.	5 pagi - bangun
6 pagi - mencuci pakaian	Antara jam 5 pagi sampai jam 8 pagi: bersosialisasi dengan tetangga
7 pagi - sarapan pagi	8-11 pagi - pergi menangkap ikan dengan anak laki-laki.
Antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore: mengurus anak-anak atau cucu; menyiapkan makan siang; membantu suami di peternakan rumput laut	12 siang - makan siang
5 sore - pulang ke rumah dan menyiapkan makan malam dan makan malam.	Antara jam 1 sampai jam 5 sore – melakukan budidaya rumput laut.
Antara pukul 18.30 sampai 11 malam, anak-anak tidur pada pukul 8 malam; menonton TV dan membuat kerajinan kulit kerang (menghasilkan P15/lusin).	5 sore - kembali ke rumah; bersosialisasi, nonton TV
Rutinitas Lainnya:	Antara jam 7 malam sampai jam 9 malam – tidur
Setelah suami kembali pada jam 2 siang, pergi ke pasar/depan gereja untuk menjual ikan yang ditangkap jam 3 sore.	

Sumber: Tambuyog 2008

Namun, penelitian yang dilakukan dengan analisis perilaku peran gender pada pekerjaan reproduksi menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu melakukan kerja perawatan tak berbayar (kerja reproduksi) dibandingkan dengan laki-laki di rumah tangga mereka. Ini terlepas dari kenyataan bahwa mereka secara substansial terlibat dalam pekerjaan berbayar (produksi) sebagai wiraswasta atau pekerja informal dan menghasilkan tambahan pendapatan untuk rumah tangga. Dalam beberapa kasus, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga sama dengan pendapatan laki-laki atau kadang-kadang melebihi terutama ketika bulan paceklik untuk menangkap ikan.

Meskipun perempuan dalam rumah tangga nelayan melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan di dalam atau di luar rumah, mereka masih melakukan sebagian besar tugas rumah tangga dengan bantuan anak perempuan mereka. Biasanya, mereka menghabiskan waktu berjam-jam lebih lama untuk

melakukan tugas ini. Pekerjaan yang perlu dilakukan melibatkan kekuatan otot seperti mengambil air dari sumber yang jauh jaraknya sedang memperbaiki bagian rumah dikerjakan oleh laki-laki.

Ibu dan anak perempuan (dalam keluarga) melakukan lebih banyak pekerjaan dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki. Ibu, yang tidak memiliki anak perempuan atau memiliki anak perempuan tapi meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar desa atau sudah menikah, bekerja dengan sangat keras. Mereka mulai bekerja pagi-pagi sekali hingga larut malam. Sebelum suami mereka (para nelayan) pergi ke laut pada pukul tiga dini hari, mereka harus bangun setidaknya satu jam sebelumnya untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan suami mereka dalam perjalanan menangkap ikan. Beberapa suami kembali ke pantai pada pukul 7 pagi untuk menjual apa pun yang mereka tangkap (misalnya ikan, udang), setelah itu, mereka bisa beristirahat sepanjang hari. Ibu, di sisi lain, harus menyiapkan sarapan pagi, berjualan ikan, menyiapkan makan siang, mengupas kulit kerang hijau dari tengah hari hingga senja, lalu pulang untuk menyiapkan makan malam. Anak perempuan yang bersekolah membantu ibu mereka setelah pulang

sekolah. Anak perempuan di luar sekolah mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan juga membantu ibu mereka untuk mengupas kulit kerang hijau. (Saragih & Ramanta 2008)

Dalam hal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri berbagi tanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut pendidikan anak-anak. Penganggaran rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab para istri sementara hal-hal yang menyangkut biaya utama seperti investasi dan pembelian peralatan menangkap ikan diputuskan bersama namun keputusan akhir dibuat oleh suami. Jika pendapatan rumah tangga tidak mencukupi untuk menutup biaya kebutuhan mendesak seperti makanan, adalah tanggung jawab perempuan untuk mencari utang. Akibatnya, juga merupakan tanggung jawab perempuan untuk mencari cara bagaimana membayar pinjaman tersebut. Untuk itu, salah satu mekanisme penanggulangannya adalah berhemat pada pembelian makanan dan mengorbankan kebutuhan pribadi seperti pakaian.

Pembagian kerja di lokasi penelitian sangat dipengaruhi oleh norma dan tradisi budaya yang berlaku di negara mereka. Misalnya, di Giao Xuan, seperti komunitas pedesaan lainnya di Vietnam, ideologi Konghucu yang kuat masih ada dimana perempuan dan laki-laki memiliki keyakinan kuat mengenai perilaku perempuan yang sesuai. Perempuan sering diminta untuk mendahulukan keluarga mereka sebagai prioritas, mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga dan mengurus anggota keluarga dengan mengorbankan kesehatan atau aspirasi mereka sendiri. Pekerjaan rumah tangga diterima sebagai hal yang "alamiah" dan tidak dianggap sebagai pembagian kerja yang tidak setara. Pekerjaan perempuan dipandang sebagai "pekerjaan ringan" dibandingkan dengan "pekerjaan berat" laki-laki di ladang atau di laut. Akibatnya, perempuan mungkin tidak sadar atau tidak menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau kebijakan.

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Isu dan permasalahan

Perempuan dan laki-laki melakukan tugas yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, dan dalam banyak hal, peran mereka saling melengkapi satu sama lain. Dalam akuakultur misalnya, 50% tugas memberi makan ikan, panen dan pemasaran dilakukan oleh perempuan. Dalam budidaya rumput laut, perempuan melakukan aktivitas yang sama seperti laki-

laki dalam penanaman, pengelolaan dan pemeliharaan peternakan, pemanenan, penyimpanan dan pengepakan, terutama dalam kegiatan budidaya yang dilakukan di perairan dangkal. Terlepas dari partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut, serta kontribusi yang mereka berikan di dalam rumah tangga (uang tunai dalam bentuk pendapatan atau tabungan, makanan), pembagian gender umumnya tetap sama: perempuan terus bertanggung jawab atas aktivitas domestik dan reproduksi seperti pekerjaan atau rutinitas rumah tangga dan merawat anak-anak.

Kegiatan perempuan dalam perikanan seringkali dianggap sebagai bagian dari pekerjaan rumah tangga; dalam hal ini, ia seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan berbayar. Pekerjaan perempuan, bersama dengan anggota keluarga lainnya, sering dianggap sebagai ekstensi dari pekerjaan laki-laki karena dianggap tidak dibayar, sebagai tenaga kerja tak berupah. Terlepas dari kontribusi perempuan (dalam hal uang tunai, kebaikan, pelayanan, dan kerja sukarela) terhadap ekonomi rumah tangga, masyarakat, dan ekonomi perikanan, kontribusi perempuan sebagian besar tetap dianggap tidak bernilai, tidak terlihat, dan tidak dikenali. Selain itu, budaya patriarki yang kuat dan pemikiran stereotip berbasis gender yang ada di masyarakat turut menghambat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada hak mereka sebagai perempuan dan sebagai anggota masyarakat.

Penutup: Akses dan Hak atas Sumber Daya Darat dan Laut Masih Terbatas

Kebanyakan masalah yang dihadapi perempuan dan laki-laki di masyarakat pesisir berasal dari kurangnya dan/atau kepemilikan tanah yang terbatas. Perbedaan kepemilikan lahan dan hak kepemilikan antara laki-laki dan perempuan berkontribusi pada ketidaksetaraan struktural dan kemiskinan bagi perempuan dan keluarga mereka. Akuakultur, misalnya, pada dasarnya adalah kegiatan budi daya; dengan demikian, tanah dalam sistem budi daya tambak sangat penting. Demikian juga partisipasi dalam sistem budidaya *pen* (*pen culture*) dan keramba jaring apung (*cage culture*) serta budidaya rumput laut melibatkan pembangunan struktur dalam permukaan air tawar dan laut yang memerlukan beberapa bentuk perjanjian sewa guna usaha dengan pemerintah yang mengendalikan sumber daya tersebut.

Perempuan miskin merasa lebih sulit daripada laki-laki miskin untuk mengakses dan memiliki tanah karena

kendala budaya dan hukum. Di Filipina, hamparan bidang tambak yang luas terbebas dari penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah (*land reform*) yang membatasi kemungkinan petani miskin dan perempuan miskin untuk memiliki lahan budi daya air. Praktik yang sering terjadi dalam keluarga di Filipina adalah pewarisan tanah kepada laki-laki jauh lebih terbatas dibanding kemungkinan perempuan dalam kepemilikan tanah. Kendatipun demikian, jika perempuan mewarisi tanah, kepemilikan tanah akan berpindah kepada suami ketika mereka menikah. Meskipun tidak ada hambatan hukum bagi perempuan untuk melakukan kontrak sewa dengan pemerintah, hanya sedikit dari mereka yang memiliki modal ekonomi yang mampu melakukannya. Sebagian besar usaha akuakultur, baik yang dikelola oleh perusahaan atau rumah tangga, biasanya dimiliki dan dikendalikan oleh laki-laki.

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 secara formal mengadopsi konsep kepemilikan bersama atas properti yang dibeli saat menikah (harta perkawinan). Perempuan mungkin merasa terlindungi karena mereka diakui sebagai pemilik bersama sesuai dengan budaya dan norma. Namun pada kenyataannya, beberapa bidang tanah atau lahan, terdaftar sebagai nama bersama atas suami dan istri. Ada kecenderungan kuat atas tanah tersebut untuk didaftarkan atas nama suami. Permasalahan akan muncul saat tanah menjadi aset yang bernilai jual dan hak atas tanah yang semakin ditentukan oleh kepemilikan legal. "Kuranginya kesadaran perempuan terhadap kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi bersama juga berkontribusi terhadap rendahnya persentase pemberian sertifikat bersama terhadap kepemilikan tanah/properti berdasarkan status perkawinan" (The Asia Foundation et al. 2006).

Pada dasarnya, upaya pengembangan perikanan terkonteks dalam kemiskinan dan eksklusivitas sosial, serta degradasi ekosistem dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, permasalahan perempuan dalam perikanan harus ditangani sesuai dengan bagaimana kondisi eksklusivitas sosial dan kemiskinan, yang dianalisis dalam proses marginalisasi nelayan tradisional (*artisanal fishers*). Namun, dalam pengkajian mendalam terhadap berbagai analisis perempuan dalam perikanan menunjukkan bahwa kajian tersebut dianalisis dalam konteks marginalisasi nelayan secara umum. Perihal sejauh mana hubungan kekuasaan dan gender memengaruhi kehidupan perempuan di perikanan sering kali diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih ditemukan adanya intervensi-intervensi proyek, strategi, dan proses yang tidak berdampak maksimal

bagi perempuan. Lebih buruk lagi, intervensi dan proses ini dapat menambah buruk kondisi perempuan yang sebenarnya sudah terlalu terbebani.

Daftar Pustaka

Elson, D 1999, "Labour Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issue", *World Development*, vol. 27, no. 3, h. 611-627.

MCD 2008a, *Women's Participation in Coastal Community Education Activities at Trao Reef Marine Reserve, Van Ninh District, Khanh Hoa Province*, MCD, Vietnam.

MCD 2008b, *Gender Issues and Livelihood Development in a Coastal Wetlands Community of Xuan Thuy National Park*, MCD, Vietnam.

Saragih MD & Ramanta D 2008, *Pembangunan untuk siapa? Dampak Reklamasi terhadap Perempuan Nelayan dan Anak Perempuan di Pantai Utara Jakarta, Indonesia*, Kiara, Jakarta.

Shelton, BA & John, D 1996, "The division of household labour", *Annual Review of Sociology*, vol. 22, h. 299-322.

Tambuyog 2008, *Women and Seaweed Farming in Calatagan, Batangas*, Tambuyog, Filipina.

The Asia Foundation, ADB, CIDA, National Democratic Institute, World Bank 2006, *Country Gender Assessment: Indonesia*, Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Department, Asian Development Bank Manila, Philippines.

Catatan Akhir

- 1 Perempuan dan laki-laki mempunyai tiga peran; reproduksi, produksi, dan pengaturan masyarakat/politik. Pekerjaan produksi - pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membayar tagihan; termasuk produksi pasar dan produksi rumahan. Reproduksi - melahirkan/tanggung jawab mengasuh anak, dan tugas rumah tangga yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin perawatan dan reproduksi bagi angkatan kerja. Pengorganisasian Masyarakat - kegiatan yang dilakukan terutama oleh perempuan di tingkat masyarakat, sebagai perluasan dari peran reproduksinya, untuk memastikan penyediaan dan pemeliharaan sumber daya konsumsi kolektif yang terbatas, seperti air, perawatan kesehatan dan pendidikan; kerja sukarela tanpa dibayar. Politik masyarakat - kegiatan yang dilakukan terutama oleh laki-laki di tingkat masyarakat, mengatur tingkat politik formal, seringkali dalam kerangka politik nasional.
- 2 Kerangka Relasi Sosial melihat kemiskinan muncul dari hubungan sosial yang tidak setara yang mengakibatkan ketidaksetaraan distribusi, tuntutan, dan tanggung jawab atas sumber daya. Relasi gender adalah salah satu jenis dari relasi sosial. Lembaga atau institusi memastikan produksi, pengokohan dan reproduksi relasi sosial, dan, demikian pula dengan perbedaan sosial dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, analisis gender melihat bagaimana institusi menciptakan dan mereproduksi ketidaksetaraan dalam empat lokasi kelembagaan utama: negara, pasar, masyarakat dan keluarga / kekerabatan.

- 3 Membedakan jenis kebutuhan gender: kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan perempuan sehari-hari namun tetap mempertahankan hubungan gender yang ada (kebutuhan gender praksis), dan kebutuhan yang berpotensi mengubah subordinasi gender yang ada (kebutuhan gender strategis).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

